

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN BERBASIS AKRUAL STUDI PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH:

**DELISAH S. SOS
NPM : 151801081**



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

Judul Tesis : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

N a m a : Delisah S. SOS

N P M : 151801081

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, MSi

Drs. Kariono, MA

Ketua Program Studi

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

N a m a : **D e l i s a h**
N P M : **151801081**
Program studi : **Magister Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**
Pembimbing II : **Drs. Kariono, MA**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung terhadap kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berbasis akrual sebagai variabel intervening pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus, dengan sampel sebanyak 35 SKPD dan dari masing-masing SKPD diambil 2 responden untuk mewakili tiap SKPD, sehingga total sampel berjumlah 66. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa regulasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, hanya komitmen dan sumber daya manusia yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Regulasi, sumber daya manusia, perangkat pendukung, penerapan SAP berbasis akrual, pengaruh kualitas laporan keuangan berbasis akrual.

A B S T R A C T

FACTORS THAT INFLUENCE THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS BASED ON ACRIVE Study in the Agency of Tax Management and Regional Development of Medan City

Name : ***Delisah***
NPM : ***151801081***
Study Program : ***Master of Public Administration***
Supervisor I : ***Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si***
Supervisor II : ***Drs. Kariono, MA***

The purpose of this research is to know and analyze the influence of regulation, human resources, and supporting tools to the quality of financial statements either simultaneously or partially, to know and analyze the influence of regulation, human resources, and supporting tools to the factors that influence the quality Accrual basis financial statements as intervening variables at the Regional Tax and Retribution Board of Medan City. Sampling technique in this research using census technique, with sample of 35 SKPD and from each SKPD taken 2 respondents to represent each SKPD, so total sample amounted to 66. The research instrument in the form of questionnaire. The results of this test proves that the regulation, human resources and supporting tools simultaneously affect the quality of financial statements. Partially, only commitments and human resources have a significant positive effect on the quality of financial statements.

Keywords: *Regulation, human resources, supporting tools, application of accrual based SAP, Influence the quality of accrual basis financial statements.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL STUDI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si dan Bapak Drs. Kariono, MA yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan gagasan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

6. Seluruh pegawai Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Angkatan Tahun 2015 khususnya kelas MAP-A.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.



Medan, Juni 2017
Penulis

Delisah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Originalitas Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan	12
2.1.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan	16
2.1.1.3. Komponen Laporan Keuangan.....	18
2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	20
2.1.3. Regulasi.....	23
2.1.4. Sumber Daya Manusia	25
2.1.5. Perangkat Pendukung	26
2.2. Penelitian Terdahulu	27
BAB III. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Konsep	32
3.1.1. Regulasi	33

3.1.2. Sumber Daya Manusia	33
3.1.3. Perangkat Pendukung	34
3.2. Hipotesis	34

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian	35
4.2. Lokasi dan waktu Penelitian	35
4.3. Populasi dan sampel Penelitian.....	35
4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4.5. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	37
4.5.1. Variabel Independen	37
4.5.2. Variabel Dependen	39
4.5.3. Variabel Intervening.....	39
4.6. Uji Kualitas Data	41
4.6.1. Uji Validitas.....	41
4.6.2. Uji Reliabilitas	42
4.7. Metode Analisi Data	42
4.7.1. Statistik Deskriptif	42
4.7.2. Uji Asumsi Klasik	43
4.7.2.1. Uji Normalitas	43
4.7.2.2. Uji Multikolonieritas	43
4.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas	44
4.8. Pengujian Hipotesis	44
4.8.1. Model Regresi Linier Berganda	45
4.8.2. Model Analisi Jalur	46

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Data Kuisisioner	47
5.1.1. Gambaran Data dan Sampel	48
5.1.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
5.1.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat	48

5.1.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
5.2. Statistik Deskriptif	49
5.3. Uji Kualitas Data	51
5.3.1. Uji Validitas	51
5.3.2. Uji Reliabilitas	56
5.4. Pengujian Asumsi Klasik	57
5.4.1. Uji Normalitas	57
5.4.2. Uji Multikolonieritas	59
5.4.3. Uji Heteroskedastisitas	60
5.5. Pengujian Hipotesis Pertama	61
5.5.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	61
5.5.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	62
5.5.3. Persamaan Regresi Hipotesis Pertama	64
5.5.4. Koefisien Determinasi	65
5.6. Pengujian Hipotesis Kedua	66
5.6.1. Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	66
5.6.2. Interpretasi Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	71
5.7. Pembahasan Hasil Penelitian	74
5.7.1. Pembahasan Hipotesis Pertama	74
5.7.2. Pembahasan Hipotesis Kedua	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	78
6.2. Keterbatasan	80
6.3. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Audit 2010 - 2014.....	3
Tabel 1.2. Originalitas Penelitian.....	10
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1. Daftar SKPD yang Dijadikan Sampel.....	35
Tabel 4.2. Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 5.1. Sampel dan Tingkat Pengembalian.....	46
Tabel 5.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 5.3. Responden Berdasarkan Lama Menjabat.....	47
Tabel 5.4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 5.5. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics.....	49
Tabel 5.6. Uji Validitas Variabel Regulasi.....	50
Tabel 5.8. Uji Validitas Variabel SDM.....	51
Tabel 5.9. Uji Validitas Variabel Perangkat Pendukung.....	52
Tabel 5.10. Uji Validitas Variabel Penerapan SAP Berbasis Akruar.....	53
Tabel 5.11. Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	54
Tabel 5.12. Reliabilitas Statistik.....	54
Tabel 5.13. Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	56
Tabel 5.14. Hasil Uji Multikolonieritas.....	57
Tabel 5.15. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 5.16. Uji Statistik F.....	59
Tabel 5.17. Hasil Uji Statistik t – Hipotesis Parsial.....	60
Tabel 5.18. Koefisien Determinasi – Hipotesis Pertama.....	62
Tabel 5.19. Hasil uji statistik t – terhadap variabel intervening Coefficientsa	63
Tabel 5.20. Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 5.21. Hasil uji statistik t – dengan variabel intervening Coefficientsa..	66
Tabel 5.22. Koefisien Determinasi.....	67
Tabel 5.24. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Pengaruh.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....	31
Gambar 5.1. Grafik Histogram.....	55
Gambar 5.2. Grafik Normal PP-Plots.....	56
Gambar 5.1 Diagram Alur Pengaruh Langsung.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai dasar perubahan fundamental dari reformasi di bidang keuangan maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 menandai berakhirnya era PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan hasil kerja keras Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 10 pasal, dan 2 (dua) lampiran. Lampiran I menguraikan standar akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ditetapkan. Hal ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, sesuai dengan yang tertuang di dalam

Pasal 10 ayat (2). Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, termanajemen, akuntabel dan keseimbangan antar generasi. Bahwa laporan keuangan berbasis akrual yaitu mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas untuk pengguna anggaran sebagai teknik pengendalian.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami (Sukmaningrum & Harto, 2012).

Sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi,

keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada kepala daerah. Kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian menyampaikannya LKPD tersebut kepada BPK RI sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini .

Kota Medan merupakan daerah yang mendapat predikat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan.

Tabel 1.1.
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Audit 2010 - 2014

No	Tahun	Opini	Keterangan
1	2010	WDP	Wajar dengan Pengecualian
2	2011	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2012	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
4	2013	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
5	2014	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
6	2015	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

Fenomena ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan belum menunjukkan kualitas yang lebih baik. Kondisi ini terlihat dari sumber daya manusia yang belum begitu mampu menunjukkan kualitasnya dalam mengelola keuangan daerah. Pemahaman yang mendalam atas penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih sangat dibutuhkan oleh para aparatur pengelola keuangan daerah, karena ada perbedaan antara standar akuntansi yang digunakan sebelumnya yaitu berbasis kas menuju akrual (*cash*

toward accrual), sedangkan tuntutan Undang-Undang mengharuskan SAP berbasis akrual sudah harus dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk itulah dalam hal ini peneliti ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berbasis akrual, dimana penggunaan SAP berbasis akrual ini akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama adalah regulasi (peraturan). Rahmansah (2012) menyatakan regulasi yang baik adalah penting, sebab diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dalam pembuatan aturan-aturan pelaksanaan harus juga profesional dan bertanggung jawab, jadi tidak hanya pihak-pihak yang melaksanakannya saja yang harus mematuhi atau mengikuti aturan-aturan tapi pihak regulator atau pembuat aturan juga harus mendengar, melihat dan memperhatikan *best practice* sekaligus diadakan uji public dahulu baru diimplementasikan, sehingga pihak aparatur negara lebih siap dalam melaksanakan sebuah aturan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin baik aparatur pemerintah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat

ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti,2007). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Perangkat pendukung menjadi faktor yang ketiga sebagai alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaanseperti komputer, *software*, dan lain-lain. Menurut Mulyono (2007) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas *input*, proses dan *output* dalam sebuah sistem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari komputer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan *output* serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut. Sedangkan perangkat lunak menurut Mulyono (2007) adalah sekumpulan rincian instruksi praprogram yang mengendalikan dan mengkoordinasikan komponen perangkat keras di dalam sebuah sistem informasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perangkat komputer yang memadai dan aplikasi yang terintegrasi dengan baik akan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan

Ketiga faktor diatas dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Pada era otonomi daerah saat initransparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta

membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Tujuan adanya standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangandiharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Melalui keputusan – keputusan politik dirinci dan didefinisikan guna menciptakan kepastian hukum, cara dan alat mencapainya diatur lebih lanjut dalam UUD, aturan – aturan penyelenggaraan dan perintah – perintah pelaksanaanya secara hierarkis sampai pada tingkat operasional di lapangan. Pertanggungjawabanyapun bertingkat pula. Dengan demikian tolak ukur akuntabilitas adalah efektivitas dan efisiensi agar pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Alasan utama pengambilan *setting* pada Pemerintahan Kota Medan karena Visi dan Misi Pemerintahan Kota Medan adalah terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah kota Medan profesional, berwawasan manajemen, berwawasan keuangan yang sistematis dan efisien. Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dirumuskan untuk mendukung misi Kota Medan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk

mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.

2. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai yaitu :

1. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Saat ini *issue* tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah sedang hangat-hangatnya dilaksanakan, dikarenakan amanat Undang-Undang yang mengharuskan pelaksanaannya di

tahun 2015. Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat banyak perbedaan untuk hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti dan mengembangkannya dalam tesis ini dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah regulasi, SDM, dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial?
2. Apakah regulasi, SDM, dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh Regulasi, SDM, dan perangkat pendukung terhadap kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial.

2. Pengaruh Regulasi, SDM, dan perangkat pendukung terhadap kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sebagai variabel intervening.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di sektor pemerintahan.

1.5. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dan merujuk dari penelitian Rahmansah (2012), yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” Perbedaan yang mendasar pada penelitian sekarang yaitu pada penggunaan variabel terikat keberhasilan

penerapan standar akuntansi berbasis akrual menjadi variabel intervening yang dihubungkan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Tempat dan waktu penelitian juga berbeda dimana penelitian sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung tahun 2012, lalu penelitian dilaksanakan di Kota Medan tahun 2016. Metodologi penelitian juga berbeda dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan regresi linier berganda uji F dan uji t, sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda dengan tambahan pengujian analisis jalur.

Originalitas Penelitian berupa variabel, periode, populasi dan metode analisis data dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Originalitas Penelitian

Uraian	Peneliti Sebelumnya	Penelitian Ini
1. Variabel Dependen	1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.	1. Kualitas Laporan Keuangan.
2. Variabel Independen	2. Regulasi, SDM, dan Perangkat Pendukung.	2. Regulasi, SDM, dan Perangkat Pendukung.
3. Variabel Intervening	3. –	3. Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
4. Periode	4. Tahun Penelitian 2012.	4. Tahun Penelitian 2016.
5. Populasi	5. Populasi penelitian adalah 35 SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	5. Populasi penelitian adalah 37 SKPD di Kota Medan.
6. Analisis Data	6. Regresi Linier Berganda.	6. Regresi Linier Berganda dan Analisis Jalur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP merupakan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sedangkan LKPD merupakan Laporan Keuangan masing-masing Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu indikator dari kualitas laporan keuangan adalah perolehan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.

Adapun kualitas kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur:
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa

depan.

- b) Manfaat prediktif (*prediktif value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :
- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan munculnya otonomi daerah dalam bidang keuangan, pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah bisa merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri serta mempertanggungjawabkan sendiri. Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu : pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pertanggungjawaban keuangan diatur di dalam paket regulasi keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan

Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyediakan informasi bagi penggunanya mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran.
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset.
- 2) Kewajiban.
- 3) Ekuitas.
- 4) Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 5) Belanja.
- 6) Transfer.
- 7) Pembiayaan.
- 8) Saldo Anggaran Lebih.
- 9) Pendapatan-Laporan Operasional (LO).
- 10) Beban, dan
- 11) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih informasi tambahan termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan

finansial. Komponen laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional.
- 5) Laporan Arus Kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur /bupati/ walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut

selanjutnya disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum Daerah. PPKD sebagai SKPKD menyusun pula laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada SKPD.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah basis akrual. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 pasal 1 ayat (10) yang dimaksud dengan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Amanat dari peraturan ini pula yang mengharuskan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Hal ini tentu saja bukannya tidak memiliki kendala. Beberapa Negara yang

menerapkan standar akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala yang dihadapi pada tahap awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual (Christensen, 2002). Di Negara Malaysia, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk kursus yang mengarah pada keahlian akuntansi professional (Saleh dan Pendlebury, 2006).

Hal ini juga terjadi di Kepulauan Fiji, rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Fiji, hal ini mengakibatkan adanya ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya (Tickell, 2010). Berbeda dengan Malaysia dan Fiji, di negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 2010).

Selandia Baru merupakan salah satu Negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publiknya. Tingkat perubahan (*the degree of change*) dalam sektor manajemen public di Selandia Baru dilalui dengan cepat dan sangat inovatif. Pemerintah mereformasi hampir di semua lini pemerintahan, mulai dari pelaksana (pada pejabat pengelola keuangan dan akuntan negara), sistem yang digunakan, hingga ke budaya yang dianut di setiap lembaga negara, yang dituangkan dalam *Public Finance Act 1989* (Ghulam, 2013).

Indonesia sendiri juga mengalami kendala dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan SAP, diantaranya adalah kualitas SDM yang belum memadai. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ini sebenarnya sudah mulai dilakukan beberapa cara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beberapa cara tersebut berupa pendampingan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan, pelatihan penyusunan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), serta program pemberian beasiswa bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan akuntansi sektor pemerintahan. Selain masalah SDM, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah aspek regulasi. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan selera untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah daerah merasa dijadikan objek penderita karena beberapa petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan tidak sejalan.

Menurut Suwanda dan Santosa (2014), ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, diantaranya menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah, membuat sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan membuat Bagan Akun Standar (BAS).

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi asset, kewajiban, eukitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. SAPD merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.

2.1.3.Regulasi

Perkembangan regulasi di Indonesia yang tumbuh dengan dinamis di sektor pemerintahan menjadi salah satu pemicu berkembangnya akuntansi di sektor pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan Negara telah melahirkan banyak peraturan perundangan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah

yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab. Namun, setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyadari bahwa isi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah yang lebih efisien. Maka dikeluarkanlah UU pengganti, yaitu : Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perubahan Undang-Undang itu didasari oleh :

- 1) Adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, khususnya keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah
- 2) Adanya semangat tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengedepankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan (*money follow fuction*) yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah.

Perubahan regulasi yang terbilang cukup dinamis juga mencakup tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari yang awalnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kemudian dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi ini sangat membutuhkan sosialisasi yang cepat dan menyeluruh, selain itu juga dibutuhkan pemahaman dari pelaksana dalam hal ini pemerintah daerah untuk memahami isi perubahan regulasi itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu penentu sukses atau tidaknya pelaksanaan hal-hal yang diamatkan oleh Undang-Undang tersebut. Jadi, aparat pemerintah daerah juga seharusnya lebih dinamis mengikuti perubahan regulasi tersebut.

2.1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas, 2002).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Afrianti, 2011). Menurut Aldiani (2009), pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

2.1.5. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software* dan lain lain . Menurut Mulyono (2007) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas *input*, proses dan *output* dalam sebuah sistem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari computer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan *output* serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut.

Sedangkan perangkat lunak menurut Mulyono (2007) merupakan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang dibutuhkan seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah terpasang dengan baik di komputer yang

telah disediakan. Jaringan internet juga menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses penginputan data menggunakan aplikasi SIMDA ini.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa temuan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam. Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Febiani (2014), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau” dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 66 sampel. Variabel dependen adalah efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Variabel independen adalah komitmen organisasi, SDM, sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, SDM, sarana dan prasarana secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Secara parsial, komitmen organisasi, sarana dan prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP. Sedangkan SDM tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP.

2. Sugiarto dan Alfian (2014), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor pendukung atas keberhasilan penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah di Kota Solo”. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel dependen adalah keberhasilan penerapan SAP berbasis akruaI. Variabel independen adalah SDM, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor SDM, komitmen, motivasi dan budaya secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akruaI. Sedangkan perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akruaI.
3. Darmayani *et al* (2014), dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng”. Variabel dependen adalah nilai laporan keuangan. Variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian intern. Dengan menyebarkan 40 kuisisioner, diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan dan parsial kualitas SDM, SIPKD dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan.
4. Azhar (2007), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”. Variabel dependen adalah keberhasilan

penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Variabel independen adalah regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Secara parsial komitmen, SDM dan perangkat pendukung berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan regulasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

5. Lubis (2009), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”. Variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Variabel independen adalah regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial regulasi, komitmen dan SDM berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sedangkan perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Febiani (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada satuan kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau	Variabel independen adalah komitmen organisasi, SDM, sarana dan prasarana. Variabel dependen adalah efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, SDM, sarana dan prasarana secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Secara parsial, komitmen organisasi, sarana dan prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerapan SAP. Sedangkan SDM tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAP.
2	Sugiarto dan Alfian (2014)	Faktor-faktor pendukung atas keberhasilan penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah di Kota Solo	Variabel independen adalah SDM, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukung. Variabel dependen adalah keberhasilan penerapan SA berbasis Akrua	Hasil Penelitian : faktor SDM, komitmen, motivasi dan budaya organisasi, secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua. Sedangkan perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua.
3	Darmayani <i>et al</i> (2014)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKPD), dan pengendalian intern terhadap nilai Laporan Keuangan pada bagian keuangan Setda Kabupaten Buleleng	Variabel independennya adalah kualitas SDM, penerapan SIKPD, pengendalian intern. Variabel dependennya adalah nilai Laporan Keuangan	Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara simultan dan parsial, kualitas SDM, penerapan SIKPD, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Laporan Keuangan
4	Azhar (2007)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun	Variabel independennya adalah regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung. Variabel dependennya adalah Permendagri	Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

		2006 Pemerintah Kota Banda Aceh.	pada Kota Nomor 13 Tahun 2006	dependen. Secara parsial, komitmen, SDM, perangkat pendukung berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sementara regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
5	Lubis (2009)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	Variabel independennya adalah regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung. Variabel dependennya adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007	Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi, komitmen, SDM, perangkat pendukung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, regulasi, komitmen, SDM berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

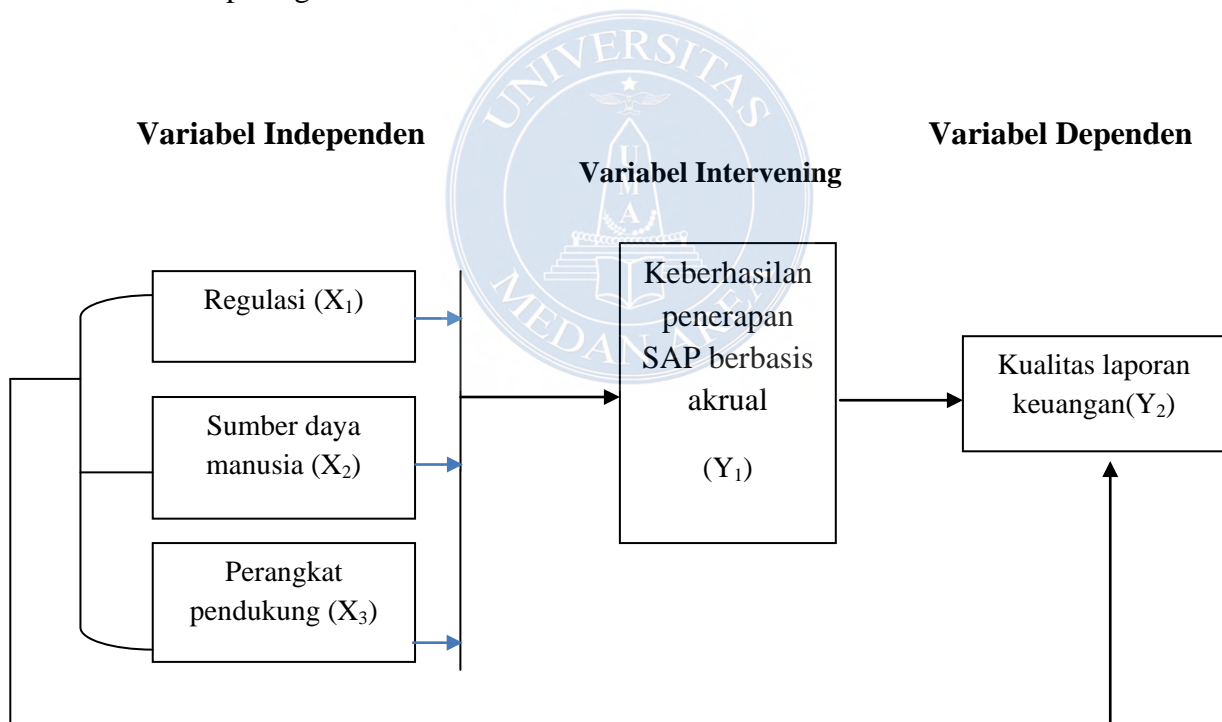


BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibentuk untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat kerangka konsep yang dapat menggambarkan proses dan tujuan penelitian. Adapun kerangka konsep yang memperlihatkan pengaruh dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 3.1. Kerangka Konsep

3.1.1. Regulasi

Regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang standar akuntansi pemerintahan termasuk cepat dalam mengalami perubahan. Awalnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan sistem berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menggunakan sistem berbasis akrual dan dipertegas dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang mengharuskan pelaksanaannya di tahun 2015. Hal ini mengharuskan aparat pengelola keuangan daerah harus cepat beradaptasi dan memahami peraturan (regulasi) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan peraturan oleh aparat pemerintah daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin baik kualitas dan kompetensi

sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.

3.1.3. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan. Perangkat pendukung yang digunakan berupa perangkat keras (komputer dan perlengkapannya) dan perangkat lunak seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan juga akses jaringan internet untuk proses penginputan data pada aplikasi SIMDA. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin baik dan terintegrasi aplikasi yang digunakan, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₁: Terdapat pengaruh Regulasi, SDM, dan Perangkat pendukung terhadap kualitas laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial.
- H₂: Terdapat pengaruh Regulasi, SDM, dan perangkat pendukung terhadap kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sebagai variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.[Skripsi]. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Aldiani, Sulani. 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.*Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia StrategiKeunggulan Kompetitif*. BPFE, Yogyakarta.
- Ardiansyah. 2013. Factors Affecting the Affecting the Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standards (case study on working units in KPPN Malang's working area).*Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Brawijaya.
- Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan PenerapanPermendagri Nomor 13 Tahun 2003 padaPemerintah Kota Banda Aceh.[Tesis]. Program Pascasarjana. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. Jakarta. Tersedia di www.bpk.go.id/ihps

- Christensen, Mark. 2002. Accrual Accounting in the Public Sector : the case of the New South Wales Government. *Journal Southern Cross University*. Vol.7 No.2, 93-124.
- Darmayani, Made Ayu. Herawati, Nyoman Trisna dan Atmaja, Anantawikrama Tungga. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program SI (Volume 2 Nomor 1)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Febiani, Ismi. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau. [Skripsi]. Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulations : The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Bussines Ethics Quarterly*. Vol. 17, page 453-467.
- Kintaatmaja, Hanggalih. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11 Edisi Khusus Juni 2015 : 160-168.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- Matindas. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha*. Edisi II, Grafiti, Jakarta.
- Mulyono, S. 2007. Struktur Hardware Komputer. *Jurnal Struktur Komputer*. Vol. 3, Nomor I, Hal 6-7.
- Putera, I Wayan Gede Yogiswara Darma dan Ariyanto, Dodik. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 13.1(2015) :14-32.
- Rahmansah. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. [Tesis]. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Ridha, M. Rasyid dan Basuki, Hardo. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Gajah Mada.
- Riyanto dan Agus, Puji. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Saleh, Z dan M.W, Pendlebury. 2002. Accrual Accounting in the Public Sector : its usefulness in economic decision making. *Journal of Finance and Management in Public Service*.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama, Bandung
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suwanda, Dadang dan Santosa, Hendri. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan*. Rosda Offset, Bandung.
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji, Harto. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi*.
- Tickell, Geoffrey. 2010. Cash to Accrual Accounting : One Nations's Dillema. *International Business and Economic Research Journal*. Volume 9 Number 11. Indiana University of Pennsylvania, USA.
- Tikk, Jutta. 2010. Accounting Changes in the Public Sector in Estonia. *Business : Theory and Practice Research Journal*. 11(1) : 77-85. Estonian Business School.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman. Atmaja, Anantawikrama Tungga dan Darmawan, Nyoman Ari Surya. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1*. Volume 2 Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wiley, John. 2007. *Government and Not-for-Profit Accounting : Concepts and Practice*. 4th Edition by Michael H. Granof

Xu, Hongjiang, Jerreta H.N., G.Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. Key issue of accounting information quality management : Australian case studies. *Industrial Management & Data System Journal*.

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. [Skripsi]. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Aldiani, Sulani. 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia StrategiKeunggulan Kompetitif*. BPFE, Yogyakarta.
- Ardiansyah. 2013. Factors Affecting the Affecting the Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standards (case study on working units in KPPN Malang's working area). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. [Tesis]. Program Pascasarjana. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. Jakarta. Tersedia di www.bpk.go.id/ihaps
- Christensen, Mark. 2002. Accrual Accounting in the Public Sector : the case of the New South Wales Government. *Journal Southern Cross University*. Vol.7 No.2, 93-124.
- Darmayani, Made Ayu. Herawati, Nyoman Trisna dan Atmaja, Anantawikrama Tungga. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program SI (Volume 2 Nomor 1)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Febiani, Ismi. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau. [Skripsi]. Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulations : The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Bussines Ethics Quarterly*. Vol. 17, page 453-467.
- Kintaatmaja, Hanggalih. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11 Edisi Khusus Juni 2015 : 160-168.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. Universitas Sumatera Utara Press, Medan.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm

Matindas. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha*. Edisi II, Grafiti, Jakarta.

Mulyono, S. 2007. Struktur Hardware Komputer. *Jurnal Struktur Komputer*. Vol. 3, Nomor I, Hal 6-7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Putera, I Wayan Gede Yogiswara Darma dan Ariyanto, Dodik. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 13.1(2015) :14-32.

Rahmansah. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. [Tesis]. Jakarta : Universitas Terbuka.

Ridha, M. Rasyid dan Basuki, Hardo. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Gajah Mada.

Riyanto dan Agus, Puji. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Saleh, Z dan M.W, Pendlebury. 2002. Accrual Accounting in the Public Sector : its usefulness in economic decision making. *Journal of Finance and Management in Public Service*.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama, Bandung
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suwanda, Dadang dan Santosa, Hendri. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan*. Rosda Offset, Bandung.
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji, Harto. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi*.
- Tickell, Geoffrey. 2010. Cash to Accrual Accounting : One Nations's Dillema. *International Business and Economic Research Journal*. Volume 9 Number 11. Indiana University of Pennsylvania, USA.
- Tikk, Jutta. 2010. Accounting Changes in the Public Sector in Estonia. *Business : Theory and Practice Research Journal*. 11(1) : 77-85. Estonian Business School.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman. Atmaja, Anantawikrama Tungga dan Darmawan, Nyoman Ari Surya. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program SI*. Volume 2 Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Wiley, John. 2007. *Government and Not-for-Profit Accounting : Concepts and Practice*. 4th Edition by Michael H. Granof
- Xu, Hongjiang, Jerreta H.N., G.Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. Key issue of accounting information quality management : Australian case studies. *Industrial Management & Data System Journal*.

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian	2016																			
	Februari				Maret				April				Mei-Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Proposal Tesis	■	■	■	■																
Bimbingan Proposal Tesis					■	■	■	■												
Kolokium Proposal Tesis										■	■	■								
Penyebaran Kuisisioner										■	■	■								
Analisis Data													■	■	■	■				
Bimbingan Penulisan Tesis														■	■	■	■	■	■	■
Seminar Hasil Tesis																			■	■

